

**DETERMINAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH:
SISTEM PERENCANAAN TERPADU**

Dedi Rosadi dan Dede Mariana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Bandung 40600

ABSTRAK

Di dalam konteks otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu propinsi, kabupaten, maupun kota merupakan salah satu ukuran kemampuan kemandirian suatu daerah otonom. Pajak Pembangunan I (PP I) salah satu sumber PAD yang paling potensial, yang besarnya 10% dari jumlah biaya atas pemakaian jasa layanan hotel dan rumah makan. Namun penerimaan dari sektor PP I ini pada setiap kabupaten di Propinsi Jawa Barat masih belum optimal. Keadaan itu diduga erat kaitannya dengan konsep perencanaan terpadu yang belum dirujuk di dalam upaya optimalisasi perolehan PAD dari sektor pajak daerah, khususnya PP I. Pertanyaan dalam studi ini: pertama, bagaimana perbedaan realisasi penerimaan PP I dibandingkan potensinya; kedua, apakah perencanaan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dalam pungutan PP I telah sesuai persyaratan perencanaan terpadu; ketiga, apakah ada pengaruh dari perencanaan terpadu terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor PP I. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perencanaan terpadu sangat bermakna dalam upaya pengoptimalan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Kata Kunci : Perencanaan terpadu, pajak daerah.

**DETERMINANTS IN INCREASING OF ORIGINAL REGIONAL REVENUE:
INTEGRATED PLANNING SYSTEM**

ABSTRACT

In regional authonomy context, original regional revenue from provinces, regencies, or municipalities is a one measurement of selfreliance for authonomic region. Tax of regional development (PP I) is a potential source of the original regional, 10% to charge hotel and restaurant services tariff. But, the revenue from PP I sector in regency of West Java Province is not optimize. This is, effort original regional revenue from regional tax without integrated planning concept. Question this study: first, how different the result revenue of PP I The questions this study; from its potential second, what is a planning of regional collecting in regency of West Java within integrated planning prerequisite; and third, what is and how influence integrated planning for original regional revenue generate, specially PP I sector. The result of this study the integrated planning has very significant in the effort of optimizing ingenious regional revenue from the regional tax sector.

Keywords: Integrated Planning, Regional Tax.

PENDAHULUAN

Di dalam konteks otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu propinsi, kabupaten, maupun kota kerap kali dijadikan sebagai salah satu ukuran yang dianggap mencerminkan kemampuan kemandirian suatu daerah otonom. Asumsi ini tetap berlaku baik pada masa UU Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maupun pada masa UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah. Bagi pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah yang bersumber dari kegiatan pariwisata dianggap sebagai pajak daerah yang "gemuk". Pajak daerah dimaksud adalah Pajak Pembangunan I (PP I) yang besarnya 10% dari jumlah biaya atas pemakaian jasa layanan hotel dan rumah makan. Lembaga yang bertanggung jawab menghimpun pajak daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Dalam tatanan kepariwisataan Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang diperhitungkan karena letaknya yang strategis baik dilihat dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Jumlah wisatawan ke Jawa Barat dengan berbagai ragam tujuan dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.

Jumlah penerimaan PP I oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat umumnya belum optimal, dalam arti penerimaan masih relatif kecil daripada potensinya yang relatif besar. Salah satu sebabnya adalah perencanaan yang dilakukan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dalam menetapkan target pungutan PP I kurang didasarkan kepada data dan informasi mengenai keadaan nyata dan tingkat perkembangan dari sumber PP I, yakni pertumbuhan kepariwisataan di daerah kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, studi yang menekankan kepada model konsepsional perencanaan terpadu (*integrated planning*) sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kesenjangan penerimaan pajak daerah antara realisasi dan potensinya menjadi sangat relevan. Atas dasar itu, dirumuskan pertanyaan studi sebagai berikut: pertama, bagaimana besarnya perbedaan antara realisasi penerimaan PP I oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dibandingkan dengan potensinya; kedua, apakah perencanaan yang dilakukan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dalam pungutan PP I telah sesuai dengan persyaratan perencanaan terpadu; ketiga, apakah ada pengaruh dari perencanaan terpadu terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor PP I.

TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI STUDI

Studi ini bertujuan: pertama, mengetahui apakah perencanaan terpadu dapat mengoptimalkan pungutan PP I; kedua, mengetahui dan mengungkapkan potensi pajak daerah yang ada di kabupaten/kota di Jawa Barat; ketiga, mengetahui upaya pemanfaatan potensi tersebut di dalam peningkatan PAD;

keempat, mengetahui besaran perbedaan antara potensi pajak daerah dengan realisasi penerimaannya; kelima, mengetahui pengaruh perencanaan terpadu terhadap upaya optimalisasi pungutan PP I.

Signifikansi dari hasil studi ini meliputi: pertama, pengembangan ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan, khususnya di dalam langkah mewujudkan otonomi daerah yang luas melalui upaya peningkatan PAD. Kedua, memberikan gambaran yang realistis mengenai perencanaan yang perlu dilakukan oleh aparat perpajakan daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor PP I. Ketiga, menjadi umpan balik untuk menilai sistem perencanaan yang dilakukan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dalam hubungannya dengan optimalisasi pungutan pajak daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA

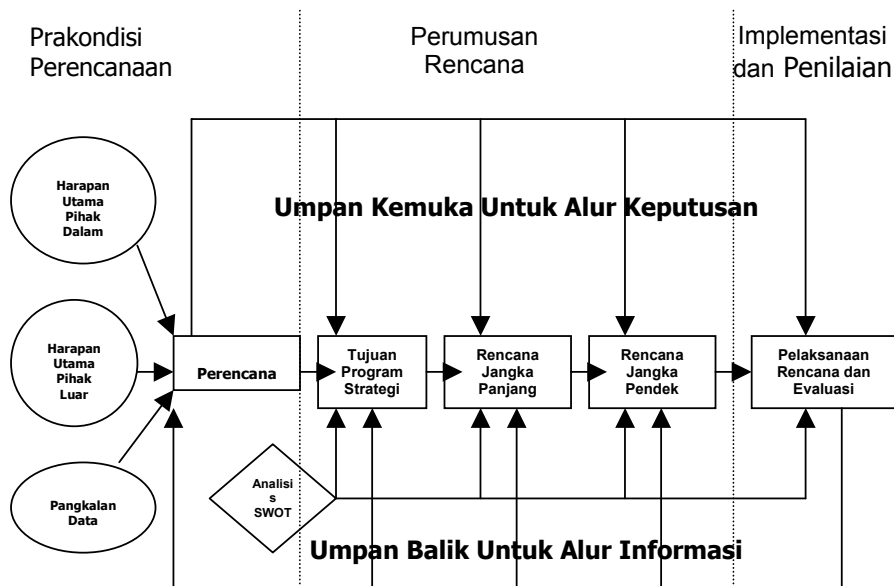
Menurut Soemitro (1980:20), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Atas kewenangannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut pajak yang berlaku di daerahnya. Pajak daerah yang berlaku sekarang ini, sebelum berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, pada dasarnya merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan secara tegas penyerahannya dengan Undang-undang. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota di Jawa Barat sangatlah beragam, yaitu antara 6 – 15 mata pajak daerah.

Dalam setiap organisasi apapun tujuan dan kegiatannya, serta tanpa melihat apakah organisasi itu besar atau kecil, memerlukan perencanaan. Dengan demikian, perencanaan dalam kehidupan modern sangat diperlukan, apalagi di dalam kondisi masyarakat dan lingkungan yang sangat dinamis. Keadaan ini akan menempatkan posisi perencanaan dalam tatanan administrasi sebagai fungsi fundamental (Winardi, 1986; Stoner & Wankel, 1986; Rosadi, 1997). Pelaksanaan dari perencanaan tersebut akan terus meresap keseluruhan fungsi manajemen lainnya (Handoko, 1994). Setiap perencanaan diarahkan kepada masa yang akan datang, sedangkan masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, atas dasar itu akan muncul berbagai alternatif yang kesemuanya itu akan berakhir kepada pengambilan keputusan (Winardi, 1989). Dalam konteks demikian, setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan menimbulkan perubahan, baik internal maupun eksternal. Setiap perubahan yang terjadi harus terus diantisipasi dengan menggunakan berbagai kekuatan yang dimilikinya agar tidak mengganggu proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan merupakan "suatu gerakan revolusioner" (Shields dalam Rosadi, 1997) dan merupakan proses yang tidak berakhir (Handoko, 1990; Holt, 1993; Rosadi, 1997).

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam segi pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah sehingga perlu upaya untuk mentransformasikan berbagai

ilmu yang sifatnya interdisiplin sebagai ujung tombak di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, konsep perencanaan terpadu sangatlah relevan. Perencanaan terpadu diartikan suatu perencanaan yang disusun secara sistemik dalam rangka mencapai sinergi di antara sub sistem yang ada. Penerapan perencanaan terpadu dalam pungutan pajak daerah diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dipakai oleh Dipenda kabupaten/kota untuk memecahkan masalah yang dihadapi di dalam melakukan pungutan pajak daerah. Secara inheren dalam penyusunan perencanaan terpadu perlu memperhatikan berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal dari organisasi. Dalam konteks itu, setiap manajer dituntut untuk memiliki keberanian dan antisipatif (*anticipation courage*) di dalam merespons setiap perubahan yang terjadi pada kedua aspek tersebut di atas. Tanpa ada keberanian dari manajer untuk mengantisipasi setiap perubahan tersebut, maka kehidupan organisasi berada dalam posisi yang berbahaya.

Konsep perencanaan terpadu dipakai sebagai kerangka kerja dalam studi ini. Secara skematis model konsepsional perencanaan terpadu, disajikan dalam gambar sebagai berikut.

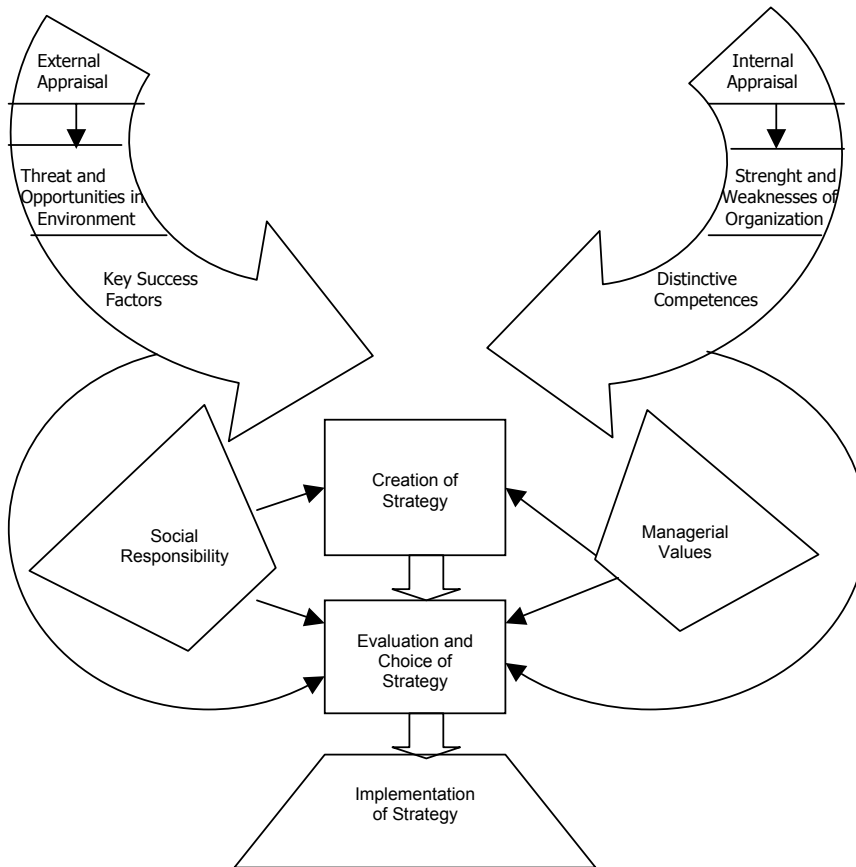


Gambar 1. Model Konsepsional Perencanaan Terpadu

Dalam proses perencanaan akan menghasilkan tujuan. Tujuan akan dijabarkan kepada berbagai perencanaan yang bersifat operasional seperti perencanaan strategi dan perencanaan lainnya. Penentuan strategi dalam

Determinan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : Sistem Perencanaan Terpadu (Dedi Rosadi dan Dede Mariana)

hubungannya dengan perencanaan sering pula disebut sebagai "SWOT model" (Mintzberg, 1994). Ini didasarkan kepada pemikiran bahwa yang paling esensial dalam perencanaan adalah adanya upaya penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan antara aspek eksternal (peluang dan tantangan) dan aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dari organisasi. Mintzberg (1994) menuangkan proses penentuan strategi ini ke dalam sebuah model seperti berikut.



Sumber: Mintzberg (1994); Rosadi (1997)

Gambar 2. Model Penentuan Strategi Dalam Perencanaan

Proses analisis SWOT dalam penentuan strategi menempati posisi kunci. Ini dimaksudkan jangan sampai terjadi apa yang disebut *over* atau *under plan*.

Namun demikian, dalam proses analisis SWOT ini akan dipengaruhi pula oleh nilai dari kepemimpinan dan nilai manajerial dari manajer sebagai pengambil keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam studi ini diajukan hipotesa sebagai berikut:

Hipotesis 1

Terdapat perbedaan nyata dari hasil pungutan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Jawa Barat dibandingkan dengan potensi dari pajak itu sendiri.

Hipotesis 2

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka pemungutan pajak daerah belum sesuai dengan persyaratan perencanaan terpadu.

Hipotesis 3

Perencanaan terpadu mempunyai pengaruh positif terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Hipotesis ini dirinci ke dalam:

Sub Hipotesis 3.1.

Terpenuhinya persyaratan "prakondisi perencanaan" dalam perencanaan terpadu mengenai pemungutan pajak daerah, akan berpengaruh positif terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Sub Hipotesis 3.2.

Terpenuhi persyaratan "perumusan rencana" dalam perencanaan terpadu mengenai pemungutan pajak daerah, akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Sub Hipotesis 3.3.

Terpenuhinya persyaratan "implementasi dan penilaian" dalam perencanaan terpadu mengenai pungutan pajak daerah, akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Sub Hipotesis 3.4.

Terpenuhinya persyaratan semua sub variabel dari perencanaan terpadu mengenai pemungutan pajak daerah secara simultan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Metode Studi, Tehnik Pengumpulan Data, dan Pengujian Hipotesis

Metode studi yang digunakan adalah metode deskriptif survai, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Unit analisis ialah Dinas Pendapatan Daerah

pada 24 kabupaten/kota di Jawa Barat, yang terdiri dari 20 kabupaten dan 4 kota. Studi difokuskan pada pelaksanaan pungutan pajak daerah sektor PP I. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk uji pengaruh, sedangkan untuk pengujian realisasi dan potensi PP I digunakan uji beda. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah: 1) observasi; 2) wawancara dengan berbagai pihak; 3) kuesioner, yang diajukan kepada responden. Responden dalam studi ini: a) para praktisi dalam bidang perencanaan di Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 24 dan para pakar teori dalam bidang ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan sebanyak 16. Pengkategorian penentuan responden itu untuk memperoleh informasi mengenai kepentingan relatif (*relative importance*) dari sub variabel perencanaan terpadu. b) responden dari para pelaksana pajak berjumlah 144, terdiri dari Kepala Sub bagian dan para Kepala Seksi Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengambilan responden dilakukan secara sensus. c) responden para pengusaha yang bergerak dalam bidang perhotelan dan rumah makan sebanyak 69 sebagai informasi pembanding (*counter information*) melalui teknik "sampling stratifikasi proporsional".

Pengujian terhadap ketiga hipotesis yang diajukan melalui tahap-tahap: pertama analisis perskalaan dengan menggunakan metode *successive interval* dengan rumus sebagai berikut :

$$NS = \frac{F(i) - f(i+1)}{P(i+1) - P(i)}$$

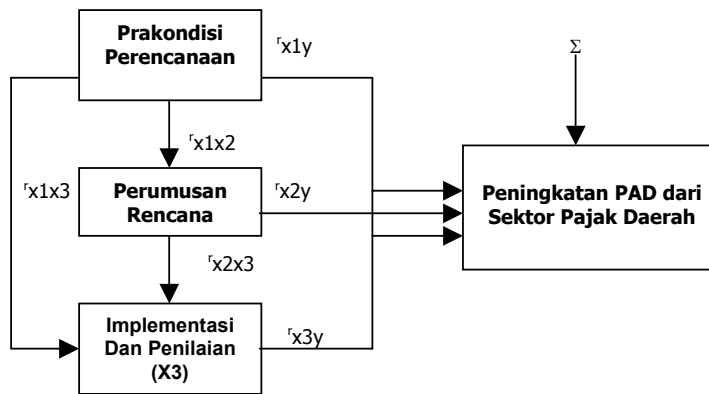
Kedua, pengujian yang menyangkut uji beda antara realisasi dan potensi pajak daerah, digunakan rumus :

$$t = \frac{b}{sb / \sqrt{n}}$$

Ketiga, pengujian yang menyangkut pelaksanaan persyaratan dari perencanaan terpadu oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat, digunakan rumus :

$$t = \frac{(x - \mu_0)}{s / \sqrt{n}}$$

Keempat, pengujian mengenai pengaruh dari perencanaan terpadu dengan sub variabelnya secara masing-masing dan bersamaan terhadap peningkatan PAD digunakan analisis jalur (*path analysis*). Bentuk paradigmanya sebagai berikut.



Gambar 3. Model Paradigma Studi

Keterangan:

X_1 = Prakondisi Perencanaan

X_2 = Perumusan rencana

X_3 = Implementasi dan penilaian

Y = Pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah

ε = Faktor-faktor lain yang akan berpengaruh terhadap pungutan pajak daerah yang tidak diperhatikan dalam penelitian.

TEMUAN STUDI DAN PEMBAHASAN

Pengujian Realisasi dan Potensi PAD dari Sektor PP I

Berapa besar perbedaan antara realisasi pungutan pajak daerah dibandingkan dengan potensinya, digunakan uji beda. Pengujian didasarkan pada data "time series" dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Hasil perhitungan mengenai uji beda ini disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel. Nilai Potensi, Realisasi dan Perbedaan antara keduanya untuk Pendapatan Asli daerah dari Sektor Pajak Daerah selama Tahun 1992 – 1995.

Jumlah	1992	1993	1994	1995
Potensi	49.560.442.025	43.972.629.165	51.300.357.500	58.955.750.454
Realisasi	13.590.338.853	18.781.479.318	24.494.926.470	30.077.124.023
Beda	35.970.103.173	25.191.149.847	26.805.431.030	28.878.626.431

Pengujian yang menyangkut pelaksanaan persyaratan perencanaan Terpadu yang dilakukan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat

1. Pengujian pelaksanaan sub variabel Prakondisi Perencanaan

- a. Pengujian dimensi harapan utama pihak dalam dan pangkalan data diperoleh nilai sebesar $-35,9261$

b. Pengujian dimensi harapan utama pihak dalam diperoleh nilai $-56,4005$.

Secara keseluruhan kedua hasil pengujian dimensi sub variabel prakondisi perencanaan diperoleh nilai sebesar $-47,8197$. Ini bermakna bahwa pelaksanaan sub variabel prakondisi perencanaan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat belum baik. Dari dimensi kepentingan pihak dalam dan pangkalan data antara lain disebabkan oleh: pertama, kesempatan untuk mengembangkan diri masih lemah, aparat pelaksana kesulitan memperoleh ijin untuk mengikuti pendidikan lanjutan meskipun atas biaya sendiri. Kesempatan mengikuti pendidikan penjenjangan masih sangat kurang, juga intensitas pelaksanaannya pun masih kurang. Kedua, lemahnya promosi dan rotasi jabatan, sangat dirasakan oleh para pegawai, kesempatan untuk memangku jabatan tertentu lebih bersifat "patronase" daripada berorientasi pada prestasi kerja. Ketiga, ketersediaan fasilitas kerja sangat kurang, sedangkan jangkauan daerah operasi sangat luas. Keempat, sumber daya manusia yang menyangkut keahlian dalam bidang perpajakan dan perencanaan masih sangat kurang. Kelima, penggunaan teknologi informasi masih sangat rendah.

Ditinjau dari dimensi kepentingan pihak luar antara lain disebabkan: pertama, sebagian besar kabupaten/kota masih merasakan kesulitan tersedianya berbagai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti keadaan jalan, sarana transportasi, air bersih, dan listrik, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha jasa hotel dan rumah makan mengenai perkembangan usahanya di kemudian hari. Kedua, tingkat pelayanan oleh Pemerintah Daerah masih buruk, misalnya: untuk perijinan memakan waktu relatif lama dan pelayanan yang tidak ramah. Ketiga, sikap aparat pajak masih menunjukkan sikap sebagai penguasa. Keempat, tidak ada insentif yang menarik bagi pengusaha sebagai wajib pungut PP I, baik yang bersifat material maupun non material.

2. Pengujian pelaksanaan sub variabel Perumusan rencana.

Hasil perhitungan mengenai pelaksanaan sub variabel perumusan rencana diperoleh nilai sebesar $-16,6071$ yang berarti bahwa sub variabel tersebut pelaksanaannya oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat belum baik. Hal tersebut diindikasikan antara lain oleh: (1) masih seringnya terdapat beda pendapat antar seksi di Dipenda mengenai penetapan besarnya pajak daerah yang akan ditetapkan dalam hubungannya dengan kondisi dan fasilitas yang dimiliki, dibandingkan dengan jangkauan luas daerah operasi. Target pungutan pajak yang harus naik tiap tahun, menjadi beban berat bagi petugas, menyangkut pajak yang kurang populer seperti pajak radio, pajak anjing dan pajak kendaraan bermotor. Terjadinya keadaan ini merupakan salah satu bukti lemahnya koordinasi Dipenda dengan instansi lainnya. (2) dalam proses pencapaian target dari pungutan pajak daerah, pimpinan sering mengambil kebijaksanaan tanpa memperhatikan kemampuan operasional

aparap perpaajakan serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dipenda, sehingga sering terjadi frustasi di kalangan pelaksana petugas pajak.

3. Pengujian pelaksanaan sub variabel Implementasi dan Penilaian

Hasil perhitungan mengenai pelaksanaan sub variabel Implementasi dan penilaian diperoleh nilai sebesar $-18,6773$. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai sub variabel Implementasi dan Penilaian dari Perencanaan Terpadu yang dilakukan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat belum baik. Lemahnya pelaksanaan dari variabel ini diindikasikan oleh: (1) penempatan pegawai pada posisi tertentu dilihat dari prestasinya kurang memadai, sehingga hal ini sering menimbulkan keirian di antara pegawai. (2) sistem imbalan terhadap pegawai yang berprestasi masih dirasa kurang memadai; (3) masih dirasakan kurangnya kegiatan penyegaran rohani terhadap para pegawai, dan program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pegawai. (4) masih lemahnya kesadaran dari para wajib pajak serta para wajib pungut untuk melaksanakan kewajibannya. (5) masih lemahnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dipenda kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak. (6) tingkat pengawasan langsung ataupun tidak langsung, fisik ataupun administratif oleh Dipenda terhadap wajib pungut masih kurang.

Pengaruh perencanaan terpadu terhadap peningkatan PAD dari sektor Pajak Pembangunan I (PP I)

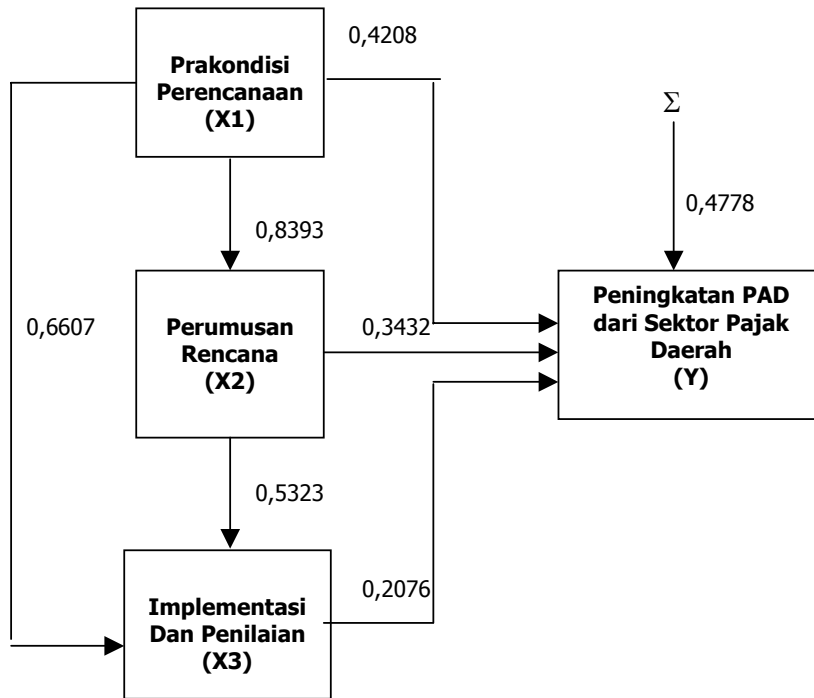
Uji pengaruh dari perencanaan terpadu terhadap peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan persamaan garis regresi linear multipel dan matriks korelasi yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Prakondisi Perencanaan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, artinya setiap subvariabel prakondisi perencanaan berubah satu satuan, akan mengakibatkan perubahan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah rata-rata sebesar $0,4208$ (dalam miliar rupiah), atau ekuivalen dengan besarnya pengaruh dari sub variabel prakondisi perencanaan secara langsung sebesar : $0,4208 \times 0,4208 \times 100\% = 17,71\%$.
Pengaruh tidak langsung dari prakondisi Perencanaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah akan terjadi beberapa hal berikut :
 - a. Pengaruh Prakondisi Perencanaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah melalui Perumusan Rencana adalah = $0,4208 \times 0,8393 \times 0,3432 \times 100\% = 12,12\%$,
 - b. Pengaruh Prakondisi Perencanaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah melalui Implementasi dan Penilaian adalah = $0,4208 \times 0,6607 \times 0,2076 \times 100\% = 5,77\%$,

Determinan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : Sistem Perencanaan Terpadu (Dedi Rosadi dan Dede Mariana)

- c. Pengaruh Prakondisi Perencanaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah melalui Perumusan Rencana dan Implementasi Penilaian adalah $= 0,4208 \times 0,8393 \times 0,5323 \times 0,2076\% = 3,90\%$,
- Jumlah pengaruh Prakondisi Perencanaan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah $= 17,71\% + 12,12\% + 5,77\% + 3,90\% = 39,50\%$
2. Perumusan rencana berpengaruh langsung secara positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, artinya setiap nilai perumusan rencana berubah satu satuan, maka peningkatan pendapatan asli daerah rata-rata akan berubah sebesar 0,3432 (dalam miliar rupiah), di mana besarnya pengaruh langsung dari subvariabel perumusan rencana terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar : $0,3432 \times 0,3432 \times 100\% = 11,78\%$
- Pengaruh Perumusan Rencana terhadap Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah melalui Implementasi dan Penilaian sebesar $0,3432 \times 0,5323 \times 0,2076 \times 100\% = 3,79\%$. Jumlah pengaruh Perumusan Rencana terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah $11,78\% + 3,79\% = 15,57\%$.
3. Implementasi dan Penilaian berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, di mana setiap rumusan rencana berubah satu satuan, maka peningkatan pendapatan asli daerah akan berubah rata-rata sebesar 0,2076 (dalam miliar rupiah), dan besarnya pengaruh subvariabel implementasi dan penilaian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar $0,2076 \times 0,2076 \times 100\% = 4,31\%$.
4. Secara bersama-sama pengaruh langsung subvariabel dari perencanaan terpadu terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar $R^2 \times 100\% = 0,8785^2 \times 100\% = 77,17\%$, sedangkan faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di luar subvariabel Prakondisi Perencanaan, Perumusan Rencana serta Implementasi dan Penilaian sebesar $0,4778 \times 0,4778 \times 100\% = 22,83\%$.

Bentuk Struktur uji pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel Perencanaan Terpadu seperti berikut :



Gambar 4. Bentuk Struktur dan Hasil Perhitungan Uji Pengaruh

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi ini berkesimpulan: pertama, perencanaan terpadu merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah; kedua, penerimaan pajak daerah oleh Dipenda belum optimal, dalam pengertian jumlah pajak daerah yang diterima masih menunjukkan kesenjangan yang relatif besar terhadap potensinya; ketiga, pelaksanaan perencanaan oleh Dipenda kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka menentukan besarnya target dan pelaksanaan pungutan pajak daerah belum memenuhi persyaratan suatu perencanaan terpadu. Atas dasar itu direkomendasikan, pertama, perlu ada upaya sosialisasi pada para wajib pajak dan wajib pungut agar memiliki persepsi dan pengertian mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah itu. Kedua, peningkatan kemampuan aparat pelaksana perpajakan daerah dalam menyusun perencanaan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasjid, Harun. 1993. *Teknik Penarikan Sample dan Penyusunan Skala*, Bandung: Program Pascasarjana Unpad.
- Babie, Earl. 1990. *Survey Research Methods*, California: Wardwort Publishing Co.
- Handoko, Hani T. 1994. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- ..., 1990. *Pengantar Manajemen Strategis*, Yogyakarta: BPFE.
- Holt, David H. 1993. *Management*, New Jersey: Prentice Hall.
- Mintzberg, Henry. 1994. *Rise and Fall of Strategic Planning*, New York: The Free Press.
- Rosadi, Dedi. 1997. *Sistem Perencanaan Terpadu Sebagai Salah Satu Determinan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak (Suatu Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II se Jawa Barat)*. Disertasi. Bandung: Pascasarjana Unpad, Unpublish.
- Stoner, James AF and Wankel, Charles. 1986. *Management*, New Delhi: Prentice Hall of India.
- Sumitro, Rochmat. 1980. *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco.
- Winardi. 1986. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- ..., 1989. *Perencanaan dan Pengawasan dalam bidang Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.